UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA MELALUI PENINGKATAN SDM PETUGAS PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN

Kadek Heri Dharmawan Putra¹⁾, Padmono Wibowo²⁾
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
email:kadekherydharmawan@gmail.com

INTISARI

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara sudah mengatur mengenai larangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Tetapi peredaran narkoba tersebut masih susah untuk diatasi karena berbagai tindakan penyelundupan oleh Narapidana maupun Petugas Pemasyarakatan Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kemampuan apa saja yang harus dipelajari untuk meningkatkan kualitas SDM Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan agar dapat mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum Empiris yaitu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum tersebut bekerja di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Narkoba masih banyak memiliki celah untuk dapat masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Celah tersebut baik dari kunjungan, kegiatan asimilasi, melalui Petugas Pemasyarakatan atau sebagainya. Kualitas SDM Petugas Pemasyarakatan memiliki pengaruh paling besar dalam Upaya pencegahan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga perlu melakukan peningkatan dalam berbagai hal. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bekal pengetahuan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan integritas dan peningkatan kemampuan petugas untuk memberikan pembinaan.

kata kunci: Peredaran Narkoba, Kualitas SDM, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

The Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013 concerning the Rules and Regulations for Correctional Institutions and State Detention Centers, regulates the prohibition of drug trafficking in Correctional Institutions/State Detention Centers. However, drug trafficking is still difficult to control due to various smuggling actions by convicts and correctional officers. This research aims to discuss what skills must be learned to improve the quality of human resources for correctional officers at correctional institutions so that they can prevent drug trafficking within correctional institutions. The type of research used is Empirical Legal research, namely looking at the law in real terms and examining how the law works in society. This research uses a Legislative Approach and a Case

Approach. There are still many loopholes for drugs to enter correctional institutions. These gaps either come from visits, assimilation activities, through Correctional Officers or so on. The quality of human resources for correctional officers has the greatest influence on efforts to prevent drug trafficking in correctional institutions, so it is necessary to improve in various ways. This improvement can be done by providing knowledge, improving facilities and infrastructure, increasing integrity, and increasing the ability of officers to provide guidance.

keywords. *Drug Trafficking, Quality of Human Resources, Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Peredaran Narkotika merupakan masalah skala nasional yang masih sangat susah untuk diberantas sampai saat ini. Penggunaan narkotika dewasa ini sudah menjadi *trend* atau gaya hidup di berbagai kalangan, tidak saja di lingkungan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, juga sudah menjalar kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Peredaran narkoba yang luas tersebut menjadi peluang bagi para bandar-bandar untuk meraup keuntungan dari penjualan narkoba. Mereka akan mencari berbagai cara untuk mengedarkan narkoba seperti penyelundupan melalui kapal, melalui truk dan bahkan menyuap Petugas Pemasarakatan terkait agar penyelundupan dapat berjalan dengan lancar. Masalah tersebut merupakan dilemma yang terjadi saat ini karena memberikan dampak negatif untuk sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya tindak kejahatan.

Lembaga Pemasarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat bergabung kembali ke Masyarakat. Pembinaan merupakan sebuah Upaya untuk memperbaiki diri narapidana sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang mengatakan Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar. Pada penerapannya banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maupun Petugas Pemasarakatan pemasarakatan itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pungli, jual beli kamar judi, dan yang paling fatal adalah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan. Kasus peredaran narkoba seringkali terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasarakatan di Indonesia yang mencoreng nama Lembaga Pemasarakatan. Sehingga peredaran narkoba tersebut memberikan stigma negatif kepada Lembaga Pemasarakatan yang menyebabkan tujuan dari pemasarakatan untuk mengembalikan narapidana ke kembali ke masyarakat sangat susah untuk dilakukan. Stigma negative tersebut

haruslah diatasi oleh Pemasarakatan dengan bantuan berbagai elemen masyarakat agar tujuan dapat dicapai dengan baik.

Peredaran Narkoba sendiri seharusnya dilarang di dalam Lembaga Pemasarakatan karena sudah diatur pada Pasal 4 Angka 7 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Tetapi pada pelaksanaannya narapidana tetap nekat untuk melanggar aturan tersebut dengan berbagai cara seperti penyelundupan yang dilakukan baik melalui anak buah mereka di luar Lembaga Pemasarakatan maupun melalui Petugas Pemasarakatan pemasarakatan itu sendiri. Selain penyelundupan narkoba yang beredar di Lembaga Pemasarakatan, narkoba yang beredar juga ada karena para bandar membuat pabrik sendiri di dalam Lembaga Pemasarakatan yang pernah dilakukan oleh Freddy Budiman di Lembaga Pemasarakatan Cipinang pada tahun 2012.

Maraknya peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan secara garis besar disebabkan dua masalah, yaitu pertama, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan dan kedua, sistem Lembaga Pemasarakatan. Dalam penelitian ini, peningkatan SDM Petugas Pemasarakatan Pemasarakatan merupakan kunci utama dalam pencegahan peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan. Secara sederhana, tidak akan mungkin aktivitas peredaran narkoba ini berlangsung lancar dan aman dalam kurun waktu yang cukup lama, jika tidak ada kekuatan yang membackupnya, dan tidak akan mungkin Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan akan mau bermain-main dengan narkoba serta menggadaikan kredibilitasnya kalau tidak ada imbalan yang setimpal atas perbuatan tersebut. Sehingga Petugas Pemasarakatan merupakan pihak yang sangat berwenang dalam mengontrol segala kegiatan yang dilakukan narapidana dan mengatur barang apa saja yang dapat masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Selain integritas dan ketelitian dari Petugas Pemasarakatan sangat diperlukan karena Narapidana memiliki berbagai cara yang dapat dilakukan agar mereka dapat menyelundupkan narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan. Mereka biasanya menyelundupkan Narkoba tersebut melalui layanan kunjungan dan penitipan barang. Narkoba akan di sembunyikan di makanan peralatan mandi, maupun di dalam pakaian dalam pengunjung agar Petugas Pemasarakatan tidak dapat mengetahui dimana mereka menyimpan barang terlarang tersebut.

Selama ini sanksi-sanksi yang berlaku kepada Petugas Pemasarakatan tidak serta merta membuat Petugas Pemasarakatan takut dan menjauhi larangan-larangan yang diberikan kepada mereka. Sudah banyak kasus pemecatan terhadap Petugas Pemasarakatan pemasarakatan karena mengedarkan narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan. Tidak hanya pemecatan, mereka juga terkena hukuman pidana layaknya narapidana yang lainnya. Mereka seharusnya berfikir lebih panjang apabila ingin bermain dengan narkoba karena hukuman yang diterima berat dan mereka sudah mengetahui bagaimana tidak enakny menjadi seorang narapidana yang kehilangan

kemerdekaan dan juga kesulitan mencari nafkah setelah lepas nanti. Tetapi sanksi tersebut seakan-akan masih belum cukup ampuh untuk mengatasi para oknum yang bandel dan menutup mata demi keuntungan pribadi. Keuntungan yang diterima dari peredaran narkoba tidaklah sedikit dan dapat membiayai gaya hidup mereka sehari-hari. Uang yang banyak tersebut seolah-olah menutup mata mereka sehingga tidak berfikir panjang dengan perbuatan mereka. Dapat dilihat bahwa uang dapat membuat seseorang berbuat apapun saja sehingga mereka nekat melanggar hukum yang mengancam masa depan dan nama baik mereka di depan masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah instansi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap bekerjanya sebuah instansi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu aturan dapat dilaksanakan dengan dimilikinya sumber daya manusia yang baik. Perbaikan terhadap sumber daya manusia merupakan hal penting dalam pengembangan sebuah instansi agar memiliki kualitas dan daya saing. Sumber daya manusia yang baik memiliki peran yang sangat besar terhadap organisasi sehingga menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya rencana organisasi. Efektivitas dan efisiensi dapat dicapai melalui sumber daya manusia yang berkualitas dan peranan yang dimiliki oleh sumber daya manusia merupakan hal penentu segala keputusan yang dilakukan oleh organisasi. Sebesar dan sebaik apapun sebuah instansi apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan membuat sebuah organisasi berkembang ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang telah lama ada seperti peredaran narkoba itu sendiri.

Untuk membantu pencegahan peredaran narkoba dibutuhkan SDM yang baik. SDM yang baik tersebut dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dari segi kuantitas, jumlah Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan masing kurang dari jumlah yang ideal. Dari data yang didapat pada bulan oktober 2023 Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan hanya berjumlah 144 orang. Jumlah tersebut masih sangat kurang mengingat mereka harus menghadapi jumlah narapidana yang mengalami over kapasitas. Terhitung pada bulan Oktober 2023 jumlah narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan adalah 1114 orang. Jumlah yang tidak sebanding tersebut sangat mengganggu berjalannya tugas yang dimiliki khususnya pengamanan. Tak kadang Petugas Pemasarakatan pengamanan kewalahan karena ada anggota yang melakukan pengawalan maupun sedang sakit.

Selain itu dari segi kualitas yang dimiliki Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan masih harus ditingkatkan kembali. Selama ini kualitas Petugas Pemasarakatan masih belum diperhatikan dengan maksimal baik dari pihak Lembaga Pemasarakatan maupun pusat yang dibuktikan jarang sekali diadakan pelatihan maupun diklat secara berkala kepada seluruh Petugas Pemasarakatan sehingga mereka masih belum maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan kualitas SDM Petugas Pemasarakatan Pemasarakatan akan membantu juga dalam menekan peredaran Narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan. Hal ini sejalan dengan latar belakang yang di dapat bahwa peredaran

narkoba tidak luput dengan kurangnya kualitas Petugas Pemasarakatan yang dimiliki sehingga Petugas Pemasarakatan dengan mudah dikendalikan oleh narkoba.

METODE PENELITIAN (12pt)

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena menitik beratkan pada kesenjangan antara teori dengan realita dalam Lembaga Pemasarakatan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana hukum tersebut bekerja di lingkungan masyarakat. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dalam hubungannya hidup di Masyarakat maka metode penelitian hukum empiris ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang dilakukan mempergunakan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, khususnya lingkungan Lembaga Pemasarakatan. Dalam hal ini peneliti meneliti bagaimana peran Peningkatan kualitas Petugas Pemasarakatan pemasarakatan dalam mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Penelitian ini dilakukan dalam kantor wilayah bali, khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analisis terhadap peredaran narkotika wilayah Bali yaitu Petugas Pemasarakatan pemasarakatan terhadap pencegahan peredaran narkotika dalam Lembaga Pemasarakatan. Metode penelitian yang digunakan seperti: jalannya penelitian, analisis data desain penelitian, bahan penelitian, dan alat penelitian

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan yang berlokasi di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Badung dibangun pada tahun 1977 sebagai bangunan pengganti relokasi dari Lembaga Pemasarakatan lama yang berlokasi di wilayah Pekambangan Denpasar yang berada pada pusat perkotaan. Namun Lembaga Pemasarakatan Kerobokan baru difungsikan secara fisik maupun administratif pada tahun 1983. Sampai dengan saat ini Lembaga Pemasarakatan Kerobokan masih merupakan Lembaga Pemasarakatan tingkat Provinsi dan merupakan Lembaga Pemasarakatan terbesar di Provinsi Bali. Sejalan dengan perkembangan wilayah Bali yang semakin pesat maka Lembaga Pemasarakatan Kerobokan kini pun berada di pusat keramaian wisata sehingga oleh sebagian pendapat masyarakat muncul wacana untuk relokasi ke tempat lain. Akan tetapi wacana relokasi tersebut masih belum terdapat tanda-tanda realisasi sehingga sampai saat ini kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kerobokan berjalan sebagaimana adanya dengan berbagai

pembenahan baik fisik maupun sistem pelayanan. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan memiliki luas tanah 41,040 meter persegi dan secara garis besar sarana dan prasarana yang dimiliki seperti: Kantor, Pura, Masjid, Gereja, Dapur umum, Blok Narapidana dan Tahanan, Blok Pengasingan, Lapangan Olahraga, Aula, Ruang Kunjungan, Poliklinik, dan Bengkel Kerja. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kerobokan memiliki kapasitas sebanyak 320 orang dan menurut data bulan oktober dihuni sekitar 1114 orang sehingga mengalami over kapasitas. Adapun uraian tugas dari bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi tata persuratan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan. Bidang Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.
2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Tugas pokoknya memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sub Seksi:
 - a. Sub Seksi Registrasi Tugas pokoknya melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana.
 - b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Tugas pokoknya melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.
3. Seksi Kegiatan Kerja Tugas pokoknya mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja.
 - a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Berfungsi memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai Showroom / Gallery tempat untuk memamerkan dan menjual hasil karya warga binaan, tempatnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Sub Seksi Sarana Kerja Berfungsi untuk mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Tugas pokoknya yaitu

mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi ini dibantu oleh 2 (dua) Sub Seksi yaitu:

a. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Tugas pokoknya melaksanakan tugas administrasi pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban.

b. Sub Seksi Keamanan Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan Petugas Pemasarakatan jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku. Sub Seksi ini juga mempunyai tugas dalam pengawalan narapidana dan pelayanan kunjungan, serta membawahi 4 (empat) regu satgas Pengamanan Pintu Utama (P2U) dan tiap regu satgas P2U terdiri dari 3 orang.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kerobokan mempunyai 4 (empat) regu pengamanan. Tiap regu pengamanan terdiri dari 11 orang, sedangkan Petugas Pemasarakatan pengamanan Blok wanita berjumlah 2 orang dan Petugas Pemasarakatan pengeledahan kunjungan 2 (dua) orang, staf KPLP berjumlah 14 orang, dengan pembagian Shift sebagai berikut : a. Shift pagi dimulai dari pukul 07.30 sampai pukul 13.00 WITA b. Shift siang dimulai dari pukul 12.30 sampai pukul 20.00 WITA c. Shift malam dimulai pukul 19.30 sampai pukul 08.00 WITA Namun khusus untuk Petugas Pemasarakatan blok wanita tidak ada piket malam. Pada saat piket malam, penjagaan juga dibantu oleh Petugas Pemasarakatan staf dan perwira piket.

Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasarakatan

Upaya pencegahan merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah yang mungkin terjadi suatu saat. Upaya pencegahan juga bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur, terencana dan terarah agar dapat menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan agar tidak timbul atau pun menjadi semakin buruk. Modus peredaran narkoba yang selama ini terjadi di Lembaga Pemasarakatan dilakukan melalui layanan titipan makanan. Seperti yang terjadi pada tanggal 8 April 2022 seorang driver ojek online yang ditangkap usai berusaha menyelundupkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan. Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang lagi, harus diberikan sosialisasi kepada pegawai untuk mengajak dan menanamkan integritas dan komitmen agar dapat menekan peredaran narkoba. tidak hanya itu, pengunjung juga diperingati agar tidak sampai membawa barang yang dilarang. WBP juga sudah diberikan sosialisasi terkait aturan yang ada agar

mereka tahu hal seperti ini dilarang, tetapi mereka masih bandel dan nekat untuk melanggarnya. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan peredaran narkoba dapat dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, seperti Surat Edaran nomor: PAS-182.PK.01.04.02 tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. Surat edaran tersebut digunakan sebagai pedoman oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dalam rangka peningkatan pencegahan penyelundupan barang terlarang. Adapun jalur-jalur yang sering terjadi penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Melalui pengunjung (kunjungan) keluarga dan handai taulan,
- b. Melalui Petugas Pemasyarakatan Pemasyarakatan,
- c. Melalui narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan,
- d. Melalui Warga Binaan Pemasyarakatan yang keluar/masuk Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara untuk keperluan proses hukum dan/atau persidangan, izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan penting dan Berobat ke Rumah Sakit.
- e. Melalui bahan makanan Napi/Tahanan.
- f. Melalui toko/warung koperasi yang beroperasi di dalam blok dengan cara memasukkan barang terlarang ke dalam bungkus barang di jual seperti kopi/teh sachet, mie instant, detergent, rokok, air galon, dan lainnya.
- g. Melalui kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana (ceramah, pendidikan, angkut sampah, kerja sama dengan pihak ketiga dan lainnya).
- h. Melalui kunjungan insidental/asimilasi (seperti peringatan hari-hari besar, peresmian, dan lainnya);
 - i. Melalui tembok keliling dengan cara antara lain melemparkan barang dan memanfaatkan drone serta melalui binatang.

Aspek-Aspek Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba

Dalam upaya untuk meningkatkan SDM Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat dipercaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan sarana dan prasarana juga diperlukan, baik dari jumlah maupun mutunya. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang akan meningkatkan SDM Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

A. Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasarakatan Melalui Pelatihan dan Penambahan Prasarana

Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Selain itu juga disiapkan bonus atau penghargaan bagi aparat Lembaga Pemasarakatan yang berhasil menangkap penyelundup narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Menurut peneliti hal ini dapat menambah semangat aparat Lembaga Pemasarakatan untuk ringkus penyelundup narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan. Terkait masalah penyelundupan narkotika, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan juga telah mengupayakan adanya peningkatan baik dari segi sarana prasarana seperti meningkatkan kualitas dari alat deteksi logam yang masih bisa digunakan dan dilakukan perbaikan untuk yang berkualitas buruk. Selain itu peningkatan mutu SDM dari Petugas Pemasarakatan juga terus dilaksanakan. Pelatihan dasar-dasar untuk pengamanan di Lembaga Pemasarakatan terus diupayakan, mengingat bahwa memang tidak semua Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan bisa mengenali jenis dan bentuk narkotika. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkotika akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama karena semua Petugas Pemasarakatan wajib memperluas pengetahuannya tentang narkotika. Adanya sistem mutasi terhadap Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan juga dilakukan sebagai bagian dari peningkatan mutu SDM Petugas Pemasarakatan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan.

B. Peningkatan Integritas Petugas Pemasarakatan

Kegiatan Pencegahan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan memang penting, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak di dukung oleh Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Peningkatan Integritas Petugas Pemasarakatan merupakan suatu hal penting yang perlu dilakukan agar mereka melakukan tugasnya sesuai tupoksi dan tidak melenceng. Peningkatan Integrasi yang dimiliki Petugas Pemasarakatan juga dapat dilakukan dengan dilakukannya mutasi. Selain bisa memberi sedikit udara segar di dalam Lembaga Pemasarakatan, mutasi dapat digunakan untuk menambah Petugas Pemasarakatan yang dinilai memiliki integritas yang baik agar bergabung kedalam Lembaga Pemasarakatan agar dapat memotivasi dan menjadi role model kepada Petugas Pemasarakatan lain agar memiliki integritas yang baik juga. Petugas Pemasarakatan dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya agar mereka selaku meningkatkan kualitasnya dan mematuhi peraturan yang ada di dalam instansi. Selain itu, untuk menjaga integritas Petugas Pemasarakatan lainnya dan memberikan efek jera bagi

Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan, maka sebaiknya dilakukan mutasi atau pemecatan karena Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan yang seperti itulah yang membuat integritas Petugas Pemasarakatan menjadi rendah .

C. Peningkatan Kemampuan Pembinaan Terhadap Setiap Narapidana

SDM Petugas Pemasarakatan yang dimiliki sekarang dinilai masih harus ditingkatkan terutama dalam memberikan pembinaan kepribadian dan kerohanian untuk narapidana. Kemampuan ini sangat penting karena Lembaga Pemasarakatan adalah sebuah tempat narapidana untuk memperoleh pembinaan dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana agar dapat menjadi warganegara yang bertanggung jawab dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan narapidana mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan atau tindak pidana lainnya. Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan, narapidana memiliki hak memperoleh pembinaan Rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak lainnya. Pada dasarnya pembinaan kepribadian lebih terarah kepada pembinaan watak narapidana agar mereka menjauhi tindak pidana dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dan kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan negara. Tetapi hal itu belumlah bisa diterapkan dengan baik tanpa didukung kualitas SDM Petugas Pemasarakatan yang baik agar tidak hanya mengandalkan pemuka agama yang hadir ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Pembinaan kepribadian yang selama ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan di antaranya :

1. Pembinaan kesadaran beragama, yaitu dengan pendekatan spiritual seperti pelaksanaan persembahyangan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing narapidana dilanjutkan dengan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Pemuka Agama.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan melakukan upacara hari-hari besar nasional yang bertujuan mendidik mental WBP (Warga Binaan Pemasarakatan) untuk selalu berdisiplin dan selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negaranya.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), yaitu dengan mengadakan pemberian pendidikan kepada narapidana yang diberikan di dalam perpustakaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan. Selain itu ujian paket C dan B diberikan kepada narapidana yang belum lulus melaksanakan Pendidikan formal sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan.

Pembinaan kemandirian juga memerlukan SDM yang berkualitas dalam melatih narapidana. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Selama ini Petugas Pemasarakatan belum memiliki skill yang sesuai dengan program pelatihan kepada narapidana. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi para narapidana seperti pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan perak, pelatihan melukis, pelatihan barbershop, pelatihan las, pelatihan membuat bokor dengan koran dan juga pelatihan pertukangan kayu. Pelatihan yang dilaksanakan selama ini masih bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja.

Dengan peningkatan kemampuan Petugas Pemasarakatan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Petugas Pemasarakatan agar dapat memberikan pembinaan kepribadian yang efektif dan efisien. Dalam artian narapidana benar-benar dapat merubah sikap dan perilakunya agar mereka memiliki kepribadian yang baik dan memiliki skill yang mumpuni dan berguna sebagai nafkah pekerjaannya nanti saat bebas nanti. Narapidana juga diharapkan menjauhi pikiran negatif untuk mencoba-coba pengedar narkoba karena pada dasarnya mereka melakukan hal tersebut karena tidak memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara baik dan tidak didasari oleh dasar kepribadian yang kurang baik juga.

KESIMPULAN

Maraknya peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan secara garis besar disebabkan dua masalah, yaitu pertama, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan dan kedua, sistem Lembaga Pemasarakatan. Dalam penelitian ini, peningkatan SDM Petugas Pemasarakatan merupakan kunci utama dalam pencegahan peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan. Secara sederhana, tidak akan mungkin aktivitas peredaran narkoba ini berlangsung lancar dan aman dalam kurun waktu yang cukup lama, jika tidak ada kekuatan yang membackupnya, dan tidak akan mungkin Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan akan mau bermain-main dengan narkoba serta menggadaikan kredibilitasnya kalau tidak ada imbalan yang setimpal atas perbuatan tersebut. Sehingga Petugas Pemasarakatan merupakan pihak yang sangat berwenang dalam mengontrol segala kegiatan yang dilakukan narapidana dan mengatur barang apa saja yang dapat masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Jalur-jalur yang sering terjadi penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasarakatan biasanya melalui kunjungan keluarga, Petugas Pemasarakatan Pemasarakatan, program asimilasi di luar Lembaga Pemasarakatan, Warga Binaan Pemasarakatan yang keluar/masuk Lembaga Pemasarakatan dengan alasan penting dan Berobat ke Rumah Sakit, pengiriman bahan makanan, Melalui koperasi yang beroperasi di dalam blok, Melalui kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana (ceramah, pendidikan, angkut sampah, kerjasama dengan pihak ketiga dan lainnya), Melalui kunjungan insidental/asimilasi (seperti peringatan hari-hari besar, peresmian, dan lainnya) dan Melalui tembok keliling dengan cara antara lain

melemparkan barang dan memanfaatkan drone serta melalui binatang. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan Petugas Pemasarakatan yang didukung sarana dan prasarana yang mendukung agar Petugas Pemasarakatan menjalani tugasnya dengan baik. Selain itu Petugas Pemasarakatan juga harus dapat menjaga integritasnya agar segala godaan terkait peredaran narkoba dapat dicegah dengan memberikan program pembinaan yang baik kepada narapidana agar dari pihak narapidana juga tidak menyimpang saat melakukan program pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA (12pt)

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
Surat Edaran nomor: PAS-182.PK.01.04.02 tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang
Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga
Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara
- Apriansyah, N. (2017). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasarakatan Pemasarakatan Dalam Menangulangi Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Development of Correctional Officer Competencies in Overcoming Drugs Trafficking at Correctional Institution and Detention Center). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(4), 395-409..
- Wirmyati, N. L. N., & Remaja, I. N. G. (2018). penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan kelas Iib Singaraja. *Kertha Widya*, 6(2).
- Arisman, A. (2021). Analisis Penyebab peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Curup Menggunakan Diagram Fishbone. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(2), 329-335.
- Asrul, M., & Natsif, F. A. (2020). Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Pencegahaan Peredaran Narkotika. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 276-283.
- Yunus, A. M. (2020). Keterlibatan Petugas Pemasarakatan Dalam Peredaran Narkoba Dan Program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan. *Syntax Literate*, 5(11), 1232-1240.
- Alfin, A., Mahsyar, A., & Usman, J. (2020). Penerapan Fungsi MSDM Dalam Meningkatkan Tugas Polisi Khusus Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 394-409.
- Apriansyah, N. (2017). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasarakatan Pemasarakatan Dalam Menangulangi Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Development of Correctional Officer Competencies in Overcoming Drugs Trafficking at Correctional Institution and Detention Center). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(4), 395-409.
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 420-33.
- Chandra, B. Y., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 61-76.